



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2008  
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10  
TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 MARET 2008



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI  
POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke dalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008, perlu menetapkan ketentuannya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok Hakim, termasuk Hakim Justisial pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 3

- (1) Untuk mempercepat penetapan penyesuaian gaji pokok Hakim, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 4

Surat keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, aslinya disampaikan kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang dan tembusannya kepada :

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan;
- b. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## Pasal 5

- (1) Penyesuaian gaji pokok Hakim ditetapkan sesuai dengan Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Masa kerja golongan yang digunakan sebagai dasar penentuan penyesuaian gaji pokok, adalah masa kerja golongan yang dimiliki Hakim yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
- (3) Penyesuaian gaji pokok dilaksanakan dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan masa kerja golongan yang dimiliki Hakim yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

## Pasal 6

- (1) Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 masih berpangkat dibawah Penata Muda golongan ruang III/a, tetap digaji menurut peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hakim sebagai dimaksud pada ayat (1) gaji pokoknya, baru dapat ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 apabila yang bersangkutan telah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

## Pasal 7

Surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat menurut contoh dalam Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 8

Surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, aslinya disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- d. Pembuat Daftar Gaji Instansi yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## Pasal 9

- (1) Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, atau karena tidak memenuhi syarat dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian gaji pokoknya didasarkan atas gaji pokok yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan masa kerja sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat/golongan ruang yang setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokoknya, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a) selama menjalani hukuman disiplin berhak menerima gaji atas dasar gaji pokok baru berdasarkan pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada 31 Desember 2007, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-e.
  - b) setelah selesai menjalani hukuman disiplin berhak menerima gaji atas dasar gaji pokok baru berdasarkan pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.

## Pasal 10

Hakim yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu gaji pokoknya disesuaikan menurut tata cara Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara gaji pokoknya disesuaikan berdasarkan pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan 31 Desember 2007.

- b. Bagi penerima uang tunggu gaji pokoknya disesuaikan berdasarkan pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Hakim dengan hak uang tunggu.

#### Pasal 11

Dalam hal terdapat Hakim yang diangkat sebagai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, tetap menerima gaji pokok Hakim.

#### Pasal 12

Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tetapi masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, digaji menurut peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

Untuk mempermudah pelaksanaannya, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dilampirkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2008

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



**EDY TOPO ASHARI**



LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 MARET 2008

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007  
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008  
GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d

GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1,796,900	1,976,600
2	1	1,796,900	1,976,600
3	2	1,875,700	2,063,300
4	3	1,875,700	2,063,300
5	4	1,958,000	2,153,900
6	5	1,958,000	2,153,900
7	6	2,044,000	2,248,400
8	7	2,044,000	2,248,400
9	8	2,133,700	2,347,100
10	9	2,133,700	2,347,100
11	10	2,227,300	2,450,100
12	11	2,227,300	2,450,100
13	12	2,325,000	2,557,600
14	13	2,325,000	2,557,600
15	14	2,427,100	2,669,800
16	15	2,427,100	2,669,800
17	16	2,533,600	2,787,000
18	17	2,533,600	2,787,000
19	18	2,644,800	2,909,300
20	19	2,644,800	2,909,300
21	20	2,760,800	3,037,000
22	21	2,760,800	3,037,000
23	22	2,882,000	3,170,300
24	23	2,882,000	3,170,300
25	24	3,008,500	3,309,400
26	25	3,008,500	3,309,400
27	26	3,140,500	3,454,600
28	27	3,140,500	3,454,600
29	28	3,278,300	3,606,200
30	29	3,278,300	3,606,200
31	30	3,422,200	3,764,500
32	31	3,422,200	3,764,500
33	32	3,572,400	3,929,700

## GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1,850,800	2,035,900
2	1	1,850,800	2,035,900
3	2	1,932,000	2,125,200
4	3	1,932,000	2,125,200
5	4	2,016,800	2,218,500
6	5	2,016,800	2,218,500
7	6	2,105,300	2,315,900
8	7	2,105,300	2,315,900
9	8	2,197,700	2,417,500
10	9	2,197,700	2,417,500
11	10	2,294,100	2,523,600
12	11	2,294,100	2,523,600
13	12	2,394,800	2,634,300
14	13	2,394,800	2,634,300
15	14	2,499,900	2,749,900
16	15	2,499,900	2,749,900
17	16	2,609,600	2,870,600
18	17	2,609,600	2,870,600
19	18	2,724,100	2,996,600
20	19	2,724,100	2,996,600
21	20	2,843,700	3,128,100
22	21	2,843,700	3,128,100
23	22	2,968,500	3,265,400
24	23	2,968,500	3,265,400
25	24	3,098,700	3,408,700
26	25	3,098,700	3,408,700
27	26	3,234,700	3,558,300
28	27	3,234,700	3,558,300
29	28	3,376,700	3,714,400
30	29	3,376,700	3,714,400
31	30	3,524,900	3,877,400
32	31	3,524,900	3,877,400
33	32	3,679,600	4,047,600

## GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1,906,300	2,097,000
2	1	1,906,300	2,189,000
3	2	1,989,900	2,189,000
4	3	1,989,900	2,285,100
5	4	2,077,300	2,285,100
6	5	2,077,300	2,385,300
7	6	2,168,400	2,385,300
8	7	2,168,400	2,490,000
9	8	2,263,600	2,490,000
10	9	2,263,600	2,599,300
11	10	2,362,900	2,599,300
12	11	2,362,900	2,713,400
13	12	2,466,600	2,713,400
14	13	2,466,600	2,832,400
15	14	2,574,900	2,832,400
16	15	2,574,900	2,956,700
17	16	2,687,900	2,956,700
18	17	2,687,900	3,086,500
19	18	2,805,800	3,086,500
20	19	2,805,800	3,221,900
21	20	2,929,000	3,221,900
22	21	2,929,000	3,363,300
23	22	3,057,500	3,363,300
24	23	3,057,500	3,510,900
25	24	3,191,700	3,510,900
26	25	3,191,700	3,665,000
27	26	3,331,800	3,665,000
28	27	3,331,800	3,825,900
29	28	3,478,000	3,825,900
30	29	3,478,000	3,993,800
31	30	3,630,600	3,993,800
32	31	3,630,600	4,169,000
33	32	3,790,000	4,169,000

11  
GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1,963,500	2,159,900
2	1	1,963,500	2,159,900
3	2	2,049,600	2,254,700
4	3	2,049,600	2,254,700
5	4	2,139,600	2,353,600
6	5	2,139,600	2,353,600
7	6	2,233,500	2,456,900
8	7	2,233,500	2,456,900
9	8	2,331,500	2,564,700
10	9	2,331,500	2,564,700
11	10	2,433,800	2,677,300
12	11	2,433,800	2,677,300
13	12	2,540,600	2,794,800
14	13	2,540,600	2,794,800
15	14	2,652,100	2,917,400
16	15	2,652,100	2,917,400
17	16	2,768,500	3,045,400
18	17	2,768,500	3,045,400
19	18	2,890,000	3,179,100
20	19	2,890,000	3,179,100
21	20	3,016,900	3,318,600
22	21	3,016,900	3,318,600
23	22	3,149,300	3,464,200
24	23	3,149,300	3,464,200
25	24	3,287,500	3,616,300
26	25	3,287,500	3,616,300
27	26	3,431,700	3,775,000
28	27	3,431,700	3,775,000
29	28	3,582,300	3,940,600
30	29	3,582,300	3,940,600
31	30	3,739,600	4,113,600
32	31	3,739,600	4,113,600
33	32	3,903,700	4,294,100

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 MARET 2008

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007  
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008  
GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e  
GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2,022,400	2,224,700
2	1	2,022,400	2,224,700
3	2	2,111,100	2,322,300
4	3	2,111,100	2,322,300
5	4	2,203,800	2,424,200
6	5	2,203,800	2,424,200
7	6	2,300,500	2,530,600
8	7	2,300,500	2,530,600
9	8	2,401,400	2,641,700
10	9	2,401,400	2,641,700
11	10	2,506,800	2,757,600
12	11	2,506,800	2,757,600
13	12	2,616,900	2,878,600
14	13	2,616,900	2,878,600
15	14	2,731,700	3,004,900
16	15	2,731,700	3,004,900
17	16	2,851,600	3,136,800
18	17	2,851,600	3,136,800
19	18	2,976,700	3,274,500
20	19	2,976,700	3,274,500
21	20	3,107,400	3,418,200
22	21	3,107,400	3,418,200
23	22	3,243,700	3,568,200
24	23	3,243,700	3,568,200
25	24	3,386,100	3,724,800
26	25	3,386,100	3,724,800
27	26	3,534,700	3,888,200
28	27	3,534,700	3,888,200
29	28	3,689,800	4,058,800
30	29	3,689,800	4,058,800
31	30	3,851,700	4,237,000
32	31	3,851,700	4,237,000
33	32	4,020,800	4,422,900

## GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2,083,000	2,291,400
2	1	2,083,000	2,291,400
3	2	2,174,500	2,392,000
4	3	2,174,500	2,392,000
5	4	2,269,900	2,496,900
6	5	2,269,900	2,496,900
7	6	2,369,500	2,606,500
8	7	2,369,500	2,606,500
9	8	2,473,500	2,720,900
10	9	2,473,500	2,720,900
11	10	2,582,000	2,840,300
12	11	2,582,000	2,840,300
13	12	2,695,400	2,965,000
14	13	2,695,400	2,965,000
15	14	2,813,600	3,095,100
16	15	2,813,600	3,095,100
17	16	2,937,100	3,230,900
18	17	2,937,100	3,230,900
19	18	3,066,000	3,372,700
20	19	3,066,000	3,372,700
21	20	3,200,600	3,520,700
22	21	3,200,600	3,520,700
23	22	3,341,000	3,675,200
24	23	3,341,000	3,675,200
25	24	3,487,700	3,836,300
26	25	3,487,700	3,836,300
27	26	3,640,700	4,004,900
28	27	3,640,700	4,004,900
29	28	3,800,500	4,180,600
30	29	3,800,500	4,180,600
31	30	3,967,300	4,364,100
32	31	3,967,300	4,364,100
33	32	4,141,400	4,555,600

## GOLONGAN RUANG IV/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2,145,500	2,360,200
2	1	2,145,500	2,360,200
3	2	2,239,700	2,463,700
4	3	2,239,700	2,463,700
5	4	2,338,000	2,571,800
6	5	2,338,000	2,571,800
7	6	2,440,600	2,684,700
8	7	2,440,600	2,684,700
9	8	2,547,700	2,802,500
10	9	2,547,700	2,802,500
11	10	2,659,500	2,925,500
12	11	2,659,500	2,925,500
13	12	2,776,200	3,053,900
14	13	2,776,200	3,053,900
15	14	2,898,100	3,187,900
16	15	2,898,100	3,187,900
17	16	3,025,200	3,327,800
18	17	3,025,200	3,327,800
19	18	3,158,000	3,473,900
20	19	3,158,000	3,473,900
21	20	3,296,600	3,626,300
22	21	3,296,600	3,626,300
23	22	3,441,300	3,785,300
24	23	3,441,300	3,785,300
25	24	3,592,300	3,951,600
26	25	3,592,300	3,951,600
27	26	3,749,900	4,125,000
28	27	3,749,900	4,125,000
29	28	3,914,500	4,306,000
30	29	3,914,500	4,306,000
31	30	4,086,300	4,495,000
32	31	4,086,300	4,495,000
33	32	4,265,600	4,692,300

## GOLONGAN RUANG IV/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2,209,900	2,431,000
2	1	2,209,900	2,431,000
3	2	2,306,900	2,537,600
4	3	2,306,900	2,537,600
5	4	2,408,100	2,649,000
6	5	2,408,100	2,649,000
7	6	2,513,800	2,765,300
8	7	2,513,800	2,765,300
9	8	2,624,100	2,886,600
10	9	2,624,100	2,886,600
11	10	2,739,300	3,013,300
12	11	2,739,300	3,013,300
13	12	2,859,500	3,145,500
14	13	2,859,500	3,145,500
15	14	2,985,000	3,283,600
16	15	2,985,000	3,283,600
17	16	3,116,000	3,427,700
18	17	3,116,000	3,427,700
19	18	3,252,700	3,578,100
20	19	3,252,700	3,578,100
21	20	3,395,500	3,735,100
22	21	3,395,500	3,735,100
23	22	3,544,500	3,899,000
24	23	3,544,500	3,899,000
25	24	3,700,100	4,070,100
26	25	3,700,100	4,070,100
27	26	3,862,400	4,248,800
28	27	3,862,400	4,248,800
29	28	4,032,000	4,435,200
30	29	4,032,000	4,435,200
31	30	4,208,900	4,629,900
32	31	4,208,900	4,629,900
33	32	4,393,600	4,833,000



## GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 10 TAHUN 2007 (LAMA) Rp.	PP NO. 11 TAHUN 2008 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2,276,200	2,503,900
2	1	2,276,200	2,503,900
3	2	2,376,100	2,613,800
4	3	2,376,100	2,613,800
5	4	2,480,400	2,728,500
6	5	2,480,400	2,728,500
7	6	2,589,200	2,848,200
8	7	2,589,200	2,848,200
9	8	2,702,800	2,973,200
10	9	2,702,800	2,973,200
11	10	2,821,500	3,103,700
12	11	2,821,500	3,103,700
13	12	2,945,300	3,239,900
14	13	2,945,300	3,239,900
15	14	3,074,500	3,382,100
16	15	3,074,500	3,382,100
17	16	3,209,500	3,530,500
18	17	3,209,500	3,530,500
19	18	3,350,300	3,685,400
20	19	3,350,300	3,685,400
21	20	3,497,400	3,847,200
22	21	3,497,400	3,847,200
23	22	3,650,800	4,016,000
24	23	3,650,800	4,016,000
25	24	3,811,100	4,192,200
26	25	3,811,100	4,192,200
27	26	3,978,300	4,376,200
28	27	3,978,300	4,376,200
29	28	4,152,900	4,568,300
30	29	4,152,900	4,568,300
31	30	4,335,200	4,768,700
32	31	4,335,200	4,768,700
33	32	4,525,400	4,978,000

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 MARET 2008

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : ..... 1)  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Hakim;

b. .... 2);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA : Memberikan wewenang kepada para pejabat :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.....3)

untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 4)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,

..... 5)  
NIP. ....

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-c

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keputusan pendelegasian wewenang
2	2)	Tulislah konsideran yang dianggap perlu (alasan keadaan yang diinginkan) selain butir huruf a
3	3)	Tulislah nama lengkap pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan nama jabatannya dari pejabat yang diberi delegasi wewenang penyesuaian gaji pokok Hakim
4	4)	Tulislah nama tempat dan tanggal ditetapkannya surat keputusan pendelegasian wewenang
5	5)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan pendelegasian wewenang

LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 MARET 2008

CONTOH SURAT KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR .....2)

....., 1)

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2008;  
7. Keputusan ..... Nomor .....tanggal ..... 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 menyesuaikan gaji pokok Hakim sebagai berikut :

1	Nama		4)
2	N I P		5)
3	Tempat, dan tanggal lahir		6)
4	Pangkat, golongan ruang		7)
5	Masa kerja golongan	tahun      bulan	8)
6	Gaji pokok lama	Rp.	9)
7	Gaji pokok baru	Rp.	10)
8	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	tahun      bulan	11)
9	Jabatan		12)
10	Unit Kerja		13)
11	Keterangan		14)

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Hakim yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....15)
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di : .....16)

pada tanggal : ..... 17)

..... 1)

..... 18)

NIP.....

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-d

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama jabatan secara lengkap dari pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim.
2	2)	Tuliskan nomor surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim
3	3)	Jika ada pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Hakim, tuliskan nama jabatan, nomor, dan tanggal ditetapkannya surat keputusan pendelegasian
4	4)	Tuliskan nama Hakim yang disesuaikan gaji pokoknya
5	5)	Tuliskan Nomor Induk Pegawai dari Hakim tersebut nomor 4)
6	6)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Hakim tersebut nomor 4)
7	7)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang terakhir dari Hakim tersebut nomor 4)
8	8)	Tuliskan dengan angka, masa kerja golongan ruang keadaan tanggal 31 Desember 2007
9	9)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
10	10)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.
11	11)	Tuliskan dengan angka, selisih masa kerja antara jumlah masa kerja yang dimiliki Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2006 dikurangi jumlah masa kerja yang diperlukan untuk menarik gaji pokok baru sesuai golongan ruang yang bersangkutan.
12	12)	Tuliskan nama jabatan Hakim tersebut pada nomor 4) sesuai ketentuan yang berlaku. Umpamanya : Hakim Pratama, Hakim Pratama Muda, Hakim Pratama Madya, Hakim Madya Pratama, dst.
13	13)	Tuliskan unit kerja Hakim yang bersangkutan.
14	14)	Tuliskan hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pelaksanaan penyesuaian gaji pokok. Misalnya yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
15	15)	Tuliskan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Negara (KPPN) yang bersangkutan, serta nama tempat dimana KPPN berada.
16	16)	Tuliskan nama tempat ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok.
17	17)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tuliskan nama & NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan penyesuaian gaji pokok.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
BERUPA PENURUNAN PANGKAT  
PADA PANGKAT SETINGKAT LEBIH  
RENDAH

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR : ..... 2)

....., 1)

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... 3), Sdr. ....  
NIP. ....4) terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal ..... 5) telah dijatuhi  
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih  
rendah;

b. bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Hakim  
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun  
1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008;  
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 s/d .....6) menyesuaikan gaji pokok  
Hakim sebagai berikut :



1	Nama		4)
2	NIP		4)
3	Tempat, tanggal lahir		7)
4	Pangkat, golongan ruang		8)
5	Masa kerja golongan	Tahun	bulan
		9)	
6	Gaji pokok lama	Rp.	
		10)	
7	Gaji pokok baru	Rp.	
		11)	
8	Jabatan		12)
9	Unit Kerja		13)

KEDUA : Terhitung mulai tanggal .....,14 ) gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi sebagai berikut :

1	Pangkat, golongan ruang		15)
2	Masa kerja golongan	Tahun	Bulan 16)
3	Gaji pokok lama	Rp.	
		17)	
4	Gaji pokok baru	Rp.	
		18)	
5	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	..... Tahun	..... Bulan 19)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/PEKAS/Kas Daerah di .....20).
4. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
5. .... 21)

Ditetapkan di ..... 22)

pada tanggal ..... 23)

..... 1)

..... 24)

NIP. .... 25)

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama jabatan secara lengkap dari pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2	2)	Tuliskan nomor surat keputusan penyesuaian gaji pokok PNS
3	3)	Tuliskan nama jabatan, nomor dan tanggal dari pejabat yang mengeluarkan surat keputusan hukuman disiplin.
4	4)	Tuliskan nama dan NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5	5)	Tuliskan tanggal dimulainya s/d tanggal berakhirnya surat keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6	6)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya surat keputusan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7	7)	Tuliskan tempat dan tanggal lahir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
8	8)	Tuliskan pangkat/golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan saat dijatuhi surat keputusan hukuman disiplin.
9	9)	Tuliskan dengan angka, masa kerja golongan keadaan tanggal 31 Desember 2007.
10	10)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.
11	11)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.
12	12)	Tuliskan nama jabatan PNS yang disesuaikan gaji pokoknya
13	13)	Tuliskan unit kerja PNS yang bersangkutan
14	14)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun dikembalikannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil setelah berakhirnya surat keputusan disiplin.
15	15)	Tuliskan pangkat/golongan ruang dan Pegawai Negeri Sipil setelah dikembalikan pada pangkat semula, usai menjalani hukuman disiplin.
16	16)	Tuliskan dengan angka, masa kerja golongan yang baru Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
17	17)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.

1	2	3
18	18)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008
19	19)	Tulislah dengan angka, selisih masa kerja antara jumlah masa kerja yang dimiliki hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2007, dikurangi jumlah masa kerja diperlukan untuk menarik gaji pokok baru sesuai golongan ruang yang bersangkutan.
20	20)	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS atau Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta nama kota dimana KPPN/Biro/Bagian Keuangan berada.
21	21)	Tulislah nama jabatan yang dianggap perlu mendapatkan tembusan.
22	22)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok
23	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok .
24	24)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan penyesuaian gaji pokok.
25	25)	Tulislah NIP dari pejabat yang menandatangani surat keputusan penyesuaian gaji pokok